



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI DAN RDP DENGAN KEPALA  
BPH MIGAS DAN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	: 2012 -2013
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari,Tanggal	: Selasa, 21 Mei 2013
Pukul	: 10.00 s.d 18.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua	: Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM
Sekretaris	: Dr. Dewi Barliana Soetisna, M.Psi
Hadir Anggota	: 35 dari 47 Anggota Komisi VII DPR-RI orang izin
Hadir Pemerintah	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kepala BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Acara	: " Pelaksanaan Fungsi Pengawasan" Distribusi BBM Bersubsidi Tahun 2013.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 dibuka pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dengan pokok bahasan Distribusi BBM Bersubsidi Tahun 2013, diantaranya mengenai perkembangan:
  1. Realisasi distribusi BBM subsidi dan non subsidi sampai dengan Mei 2013.
  2. Kondisi distribusi BBM bersubsidi jenis tertentu per Kabupaten/Kota hingga Mei 2013.
  3. Rencana penerapan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Indonesia.
  4. Kinerja dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalkan terjadinya overkuota pendistribusian BBM bersubsidi pada kuartal pertama tahun 2013.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI, BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) melakukan pengendalian dan pengawasan BBM Bersubsidi secara lebih optimal agar meminimalkan over kuota BBM di tahun 2013.
2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI, BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan BBM Bersubsidi, antara lain dengan mengefektifkan kembali Tim Terpadu Pengawasan BBM dan memberikan laporan secara berkala.
3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI agar mengalokasikan dana yang berasal dari penghematan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur energi.
4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI agar segera menyiapkan dasar hukum agar Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) bahan bakar minyak dapat dilaksanakan secara efektif.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.15 WIB

Jakarta, 21 Mei 2013

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI  
KETUA,**

  
**Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEJANA, MM**